

**ANALISIS DETERMINAN *ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX* (I-HDI) DI
NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM**

**ANALYSIS OF DETERMINANTS *OF ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX*
(I-HDI) IN MEMBER COUNTRIES OF THE ORGANIZATION OF ISLAMIC
COOPERATION**

DEDI MARDIANTO

Institut Agama Islam Negeri Bone

dedhymardianto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Islamic Human Development Index (I-HDI) di Negara Anggota Kerjasama Islam (OKI) periode 2010 sampai dengan 2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data panel (*Common Effect Model*) sebagai model terbaik setelah dilakukan spesifikasi model uji. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Bank Dunia yang kemudian diolah dengan menggunakan perangkat lunak statistik *evIEWS 10*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan indeks persepsi korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap I-HDI di negara-negara OKI sedangkan untuk variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif dan variabel FDI tidak berpengaruh signifikan terhadap I-HDI negara-negara OKI tahun 2010 sampai dengan tahun 2019.

Kata kunci: *Indeks Pembangunan Manusia Islam, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Persepsi Korupsi, Penanaman Modal Asing*

Abstract

*This study aims to determine the factors that influence the Islamic Human Development Index (I-HDI) in the Member States of Islamic Cooperation for the period 2010 to 2019. This study uses a quantitative method with a panel data approach (Common Effect Model) as the best model after carried out the specification of the test model. The type of data used is secondary data obtained from the World Bank which is then processed using statistical software *evIEWS 10*. The results show that the variable government spending in the health sector and the corruption perception index have a significant positive effect on I-HDI in the OCI countries while for the variable government spending in the education sector*

has a negative effect and the FDI variable does not have a significant effect on I-HDI in the OIC countries in 2010 to 2019.

Keywords: *Islamic Human Development Index, Government Expenditure, Corruption Perception Index, Foreign Direct Investment*

PENDAHULUAN

Salah satu indikator pembangunan manusia adalah indeks pembangunan manusia (IPM), di mana IPM mencakup tiga variabel kesejahteraan dalam suatu indeks komposit tunggal. Namun dalam perspektif Islam, hal tersebut tidak sepenuhnya dianggap kompatibel dan cukup dalam mengukur pembangunan manusia. Karena dalam mengukur kualitas sumber daya manusia tidak hanya dari tiga variabel kesejahteraan saja, namun perlu lebih memperhatikan sisi jasmani dan rohani yang sesuai dengan *maqashid syariah*. Hal ini dikarenakan tingkat kesejahteraan manusia tetinggi ketika kebutuhan dasar terpenuhi dengan mencapai falah, yaitu keberkahan dunia dan akhirat.

Secara umum nilai IPM terbesar masih ditempati oleh beberapa negara di Eropa maupun Amerika Utara, hal ini ditunjukkan tidak adanya negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim menempati posisi dalam 30 besar nilai IPM tertinggi, namun ada beberapa negara mayoritas muslim yang menempati posisi 50 besar. Artinya negara-negara mayoritas muslim yang memiliki kekayaan banyak bukan berarti tidak terjadi kesenjangan pembangunan manusia (*Human Development Report*, 2020). Berikut negara-negara mayoritas muslim yang tergabung dalam 50 besar nilai IPM.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan IPM negara OKI 2019

Negara	Penduduk (Juta Jiwa)	IPM
Indonesia	276,361,783	0,718
Pakistan	225,199,937	0,557
Nigeria	211,400,708	0,539
Bangladesh	166,303,498	0,632
Mesir	104,258,327	0,707

Sumber: World Bank, 2019

Tabel di atas menunjukkan Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tertinggi pada negara OKI sebesar 276,361,783 juta jiwa dan Mesir berada pada posisi terendah dengan jumlah penduduk sebesar 104,258,327 Juta Jiwa, padahal nilai terendah IPM dialami oleh negara Nigeria yang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Mesir sedangkan nilai IPM Mesir berada pada posisi kedua setelah Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa ada kesenjangan yang terjadi dari sisi pembangunan manusia di negara-negara OKI.

Untuk mengatasi kesenjangan pembangunan manusia, maka dibutuhkan peran pemerintah seperti dilakukannya kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan aspek pembangunan manusia. Menurut Mangkoesoebroto (2001), pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari cerminan kebijakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah sangat membantu dalam mengatasi kesenjangan pembangunan manusia terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan. Menurut (Todaro, 2008), kesehatan dan pendidikan merupakan bagian dari tujuan pembangunan yang mendasar. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Arifin (2015), Putri & Mintaroem (2020) dan Sholekhah (2018), yang menjelaskan bahwa pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM.

Pada umumnya, untuk mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan modal yang sangat besar baik itu bersal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hodijah, (2015) menyebutkan bahwa investasi asing memungkinkan dapat mengisi kesenjangan-kesenjangan persediaan tabungan, cadangan devisa serta keahlian manajerial yang ada di negara penerima dengan tingkat persediaan yang dibutuhkan dalam mencapai target pembangunan dan pertumbuhan. Hal tersebut juga disebutkan oleh Tandipai (2019) yang menjelaskan bahwa realisasi penanaman modal asing langsung berpengaruh positif terhadap IPM.

Sementara itu, untuk mempercepat pembangunan suatu negara dapat terganggu dengan keberadaan perilaku korupsi. Dita Ayu Anantika (2020) menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan penting bagi pemerintah yang secara langsung dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat karena ketidakpastian alokasi anggaran publik yang

seharusnya digunakan dalam peningkatan pembangunan manusia. Perilaku korupsi di suatu negara seringkali di ukur dengan menggunakan nilai *Corruption Perception Index* (CPI) dengan skor 1-100, di mana skor 1 menunjukkan tingginya perilaku korupsi sedangkan skor 100 mengindikasikan bahwa perilaku korupsi sangat rendah. Sehingga semakin tinggi nilai CPI pada suatu negara, maka ada kepastian alokasi anggaran publik untuk mencapai peningkatan pembangunan manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian Sims et al. (2012) dan Del Monte & Papagni (2001), bahwa dalam peningkatan pembangunan manusia tidak terlepas dengan pemberantasan korupsi

Penelitian mengenai pembangunan manusia telah banyak dilakukan, seperti penelitian Sanggelorang et al. (2015), yang menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM di Sulawesi Utara. Palenewen et al. (2018), yang menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap IPM serta dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara. Atmajaya & Widiaty (2021) yang menganalisis pengaruh FDI dan ZIS terhadap HDI di Indonesia. Andini (2017), menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di beberapa negara ASEAN.

Beberapa penelitian sebelumnya masih kurang yang membahas indeks pembangunan manusia dari sisi Islam, sehingga penelitian hadir untuk membahas *Islamic Human Development Index* di negara OKI yang dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, FDI dan indeks persepsi korupsi. Maka inilah yang menjadi perbedaan sekaligus kebaharuan dari penelitian ini. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, FDI dan indeks persepsi korupsi terhadap *Islamic Human Development Index* di Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Indeks Pembangunan Manusia

Dalam Islam manusia ditempatkan sebagai seorang khalifah yang mengembangkan amanah untuk mengelolah bumi, sehingga pembangunan sumber daya manusia menjadi sebuah prioritas utama yang tidak dapat ditawar demikian tercapainya kesejahteraan

bergantung pada kualitas sumberdaya manusia. MB Hendrie Anto (2013) dalam risetnya menggunakan pendekatan Maqasyid al-Shariah dalam melihat dan mengukur indeks pembangunan manusia yang populer dikenal dengan istilah *Islamic Human Development Index* (IHDI), hal tersebut dilakukan karena indeks pembangunan manusia yang dikeluarkan oleh UNDP dinilai kurang komprehensif dan representatif untuk mengukur indeks pembangunan manusia dalam islam.

Chapra menyebutkan bahwa dimensi tersebut telah terakumulasi dalam lima unsur maqashid syariah yakni agama, akal, jiwa, keturunan dan harta (Chapra, 2008). Namun, terdapat dua hal yang terlewatkan dalam konsep pembangunan islam yang tidak dimuat oleh UNDP yakni agama dan moralitas, dua hal tersebut dinilai merupakan hal urgen yang jika tidak dijaga akan berakibat fatal terhadap keberlangsungan dan menciptakan kebinasaan (Irwan, 2019). Ada variabel yang dapat diproyeksikan untuk melihat I-HDI dengan merujuk pada dimensi yakni tauhid, antropologi, fisik, penalaran, spritual, etika, hewan, sosial, memutuskan, menindas diri, korupsi, moralitas, kebebasan, dan pendidikan (Necati Aydin, 2017). Tidak semua elemen selalu mempengaruhi pembangunan manusia, seperti riset yang dilakukan di 5 provinsi indonesia timur oleh Bahtiar & Hannase (2021) menunjukkan variabel jiwa dan akal tidak memberikan pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Pengeluaran Pemerintah

Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dibutuhkan sebuah biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, hal itu populer dikenal dengan istilah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat dari tindakan pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten-Kota dalam menyediakan barang dan pelayanan publik (Sitaniapessy, 2013). Pengeluaran yang ada dapat berupa pengeluaran dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan sosial. Pendidikan dan kesehatan dimaknai sebagai investasi jangka panjang dan kesehatan fundamental dalam pembangunan sumberdaya manusia (Ananda et al., 2021; Nasution et al., 2021). Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan dalam beberapa

riset memperlihatkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia seperti yang dilakukan oleh (Brata, 2005), Stephen, Razmi et al. 2012) Namun, dalam beberapa kasus kedua sektor tersebut memungkinkan tidak berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia (Astri et al., 2013; Fithri & Kaluge, 2017; Kahang, 2016). Bahkan Sukmana (2017), menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memberikan pengaruh negatif terhadap IPM.

Foreign Direct Investment

Foreign Direct Investment merupakan bentuk penanaman modal yang dilakukan oleh perusahaan internasional di negara tertentu dengan tujuan memperluas jaringan perusahaan yang ditandai dengan adanya pemindahan sumberdaya dan kontrol oleh perusahaan pemilik modal dalam jangka waktu panjang (Setiawan et al., 2021). Investasi asing langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti PDB, nilai ekspor, dan tingkat inflasi. Dalam riset (Anindita et al., 2019) memperlihatkan faktor-faktor tersebut memiliki efek simultan dengan investasi asing langsung khususnya di Indonesia.

Pada umumnya suatu wilayah atau negara yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang baik akan menjadi daya tarik dan meningkatkan minat investor untuk menanamkan modal di wilayah tersebut. Namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan hasil riset yang dilakukan oleh Anindita et al., (2019) di Indonesia, dalam risetnya menguji antara variabel pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia serta investasi asing langsung dengan hasil bahwa dengan alasan biaya tenaga kerja maka minat investor cukup rendah untuk berinvestasi di negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang baik karena akan berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk tenaga kerja. Demikian IPM juga mampu menjadi faktor penurunan minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Corruption Perception Index

Korupsi merupakan permasalahan penting bagi pemerintah yang secara langsung dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat karena ketidakpastian alokasi anggaran publik yang seharusnya digunakan dalam peningkatan pembangunan manusia (Dita Ayu

Anantika, 2020). Perilaku korupsi di suatu negara seringkali di ukur dengan menggunakan nilai *Corruption Perception Index* (CPI) dengan skor 1-100, di mana skor 1 menunjukkan tingginya perilaku korupsi sedangkan skor 100 mengindikasi bahwa perilaku korupsi sangat rendah. Sehingga semakin tinggi nilai CPI pada suatu negara, maka ada kepastian alokasi anggaran publik untuk mencapai peningkatan pembangunan manusia.

Berdasarkan latar belakang dan tujuan dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H1:** Terdapat pengaruh pemerintah sektor pendidikan terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI)
- H2:** Terdapat pengaruh pemerintah sektor kesehatan terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI)
- H3:** Terdapat pengaruh *Foreign Direct Investment* terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI)
- H4:** Terdapat pengaruh *Corruption Perception Index* terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data skunder yang dalam data panel yang mencakup 5 negara dengan jumlah penduduk terbesar pada negara-negara OKI dari tahun 2010 sampai 2019. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 50 observasi data yang diambil dari *World Bank*. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari variabel dependen dan independen. Adapun variabel dependen yaitu *Islamic Human Development Index* (Y) sedangkan pengeluaran pemerintah (X1), *Foreign Direct Investment* (X2), dan *Corruption Perception Index* (X3) adalah variabel independen.

Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang merupakan alat analisis regresi di mana data dikumpulkan secara individu (*cross section*) dan diikuti pada waktu tertentu (*time series*) dengan melalui tiga pendekatan, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Pendekatan tersebut selanjutnya akan dipilih model yang tepat untuk penelitian dengan melakukan uji chow dan uji hausman. Uji *chow* dilakukan untuk membandingkan model terbaik antara *common* dan *fixed*. Sedangkan uji hausman akan

menentukan model yang tepat antara random dengan fixed. Kemudian dilakukan regresi secara parsial melalui uji t dan pengujian secara simulat menggunakan uji F. pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan *Microsoft Excel dan Eviews versi 10*.

Adapun model persamaan regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

$$IHDI_{it} = \alpha + \beta_1 PP_{it} + \beta_2 FDI_{it} + \beta_3 CPI_{it} + e_{it}$$

Ket:

IHDI = *Islamic Human Development Index*

i = Negara

t = waktu (2010-2019)

α = konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien

PP = Pengeluaran Pemerintah

FDI = *Foreign Direct Investment*

CPI = *Corruption Perception Index*

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai nilai rata-rata, maximum dan minimum serta nilai standar deviasi masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut hasil uji statistik deskriptif pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Uji Statistik Deskriptif

	IHDI	PPP	PPK	FDI	CPI
Mean	35.58333	2.341575	3.312826	1.397545	29.55556
Maximum	56.78000	4.411126	5.633056	3.260263	38.00000
Minimum	9.370000	0.850000	2.275222	-0.204543	23.00000
Std. Dev.	11.58188	1.289637	0.933047	0.834795	4.186317
Observations	45	45	45	45	45

Sumber Data: Eviews 10 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas diperoleh:

1. Variabel IHDI memiliki nilai rata-rata sebesar 35.58333 dengan nilai maximum sebesar 56.78000 dan nilai minimum sebesar 9.370000 serta nilai standar deviasi 11.58188 dari 45 observasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti nilai IHDI kurang bervariasi.
2. Variabel PPP memiliki nilai rata-rata sebesar 2.341575 dengan nilai maximum sebesar 4.411126 dan nilai minimum sebesar 0.850000 serta nilai standar deviasi 1.289637 dari 45 observasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti nilai Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan kurang bervariasi.
3. Variabel PPK memiliki nilai rata-rata sebesar 3.312826 dengan nilai maximum sebesar 5.633056 dan nilai minimum sebesar 2.275222 serta nilai standar deviasi 0.933047 dari 45 observasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti nilai Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan kurang bervariasi.
4. Variabel FDI memiliki nilai rata-rata sebesar 1.397545 dengan nilai maximum sebesar 3.260263 dan nilai minimum sebesar 0.204543 serta nilai standar deviasi 0.834795 dari 45 observasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti nilai FDI kurang bervariasi.
5. Variabel CPI memiliki nilai rata-rata sebesar 29.55556 dengan nilai maximum sebesar 38.00000 dan nilai minimum sebesar 23.00000 serta nilai standar deviasi 4.186317 dari 45 observasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai mean lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti nilai skor CPI kurang bervariasi.

Analisis Regresi data Panel

Uji Spesifikasi Model

Uji spesifikasi model dilakukan untuk memperoleh hasil estimasi model terbaik pada regresi data panel yang meliputi *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, *Random Effect Model*. Berikut hasil yang digambarkan pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Uji Model

Uji Model	Nilai Prob	Keterangan
Uji Chow	0.1239	Model <i>Common</i> (Terbaik)
Uji Lagrange Multiplier (LM)	(0.2731)	Model <i>Common</i> (Terbaik)

Sumber Data: Eviews 10 (Data diolah)

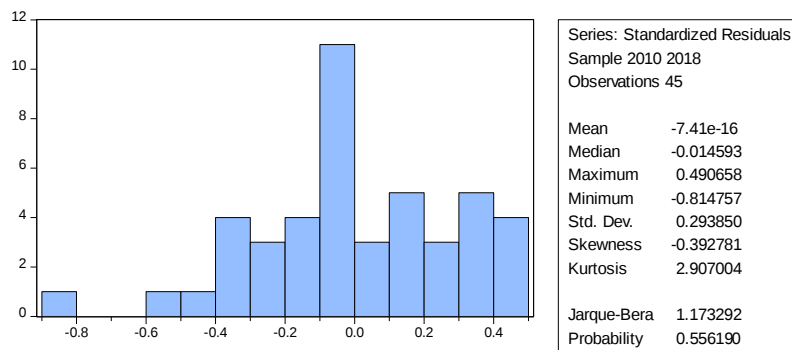
Berdasarkan pada tabel di atas diperoleh uji chow dengan nilai probabilitas yang diperoleh sebesar 0.1239 yang berarti lebih besar dari 0.005. maka gagal menolak H_0 . Sehingga diperoleh hasil estimasi model terbaik antara *Common Effect* dan *Fixed Effect* adalah *Common Effect*. Setelah itu dilakukan Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk mendapatkan hasil estimasi terbaik antara *Common Effect* dan *Random Effect*. Hasil yang diperoleh dari uji LM menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.2731 yang berarti lebih besar dari 0.05. maka gagal menolak H_0 . Sehingga diperoleh hasil estimasi model terbaik adalah *Common Effect*. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian spesifikasi model, maka *Common Effect* akan digunakan sebagai hasil estimasi terbaik dalam penelitian ini. Namun sebelum dilakukan interpretasi hasil, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik pada model *Common Effect*, karena termasuk bagian dari pendekatan OLS (*Ordinary Least Squared*).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi dilakukan untuk memperoleh hasil estimasi yang tidak bias atau memenuhi syarat BLUE. Adapun uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Adapun hasil yang diperoleh seperti pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Normalitas

Hasil uji normalitas dari gambar 1 di atas, diperoleh bahwa nilai probabilitas 0.556190 yang berarti lebih besar dari 0.05, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolenieritas

Uji multikolenieritas dilakukan untuk melihat hubungan korelasi antara variabel independen dalam penelitian. Adapun hasil yang diperoleh digambarkan pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Uji Multikolenieritas

IHDI	PPP	PPK	FDI	CPI
1.000000	-0.289060	0.046766	-0.204091	0.081245
-0.289060	1.000000	0.660799	0.550067	0.762498
0.046766	0.660799	1.000000	0.264698	0.454646
-0.204091	0.550067	0.264698	1.000000	0.380518
0.081245	0.762498	0.454646	0.380518	1.000000

Sumber Data: Eviews 10 (Data diolah)

Hasil di atas diperoleh nilai korelasi masing-masing variabel independen berada di bawah 0,90 yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen, sehingga data dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolenieritas.

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Setelah dilakukan pengujian spesifikasi model serta uji asumsi klasik, maka dalam penelitian ini menggunakan hasil estimasi *Common Effect Model* sebagai hasil estimasi

terbaik. Berikut hasil regresi data panel dengan pendekatan *Common Effect Model* di bawah ini.

Tabel 5. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.651135	1.685230	-2.759941	0.0087
PPP	-0.370851	0.074318	-4.990086	0.0000
PPK	0.198809	0.067628	2.939743	0.0054
FDI	0.035728	0.067761	0.527274	0.6009
L_CPI	5.671876	1.196758	4.739365	0.0000
R-squared		0.437711	Mean dependent var	3.506682
Adjusted R-squared		0.381482	S.D. dependent var	0.391873
F-statistic		7.784442	Durbin-Watson stat	0.894635
Prob(F-statistic)		0.000097		

Sumber Data: *Eviews 10* (Data diolah)

Berdasarkan dari tabel 5 di atas di peroleh nilai R-Squared sebesar 0.437711 yang berarti variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 43% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Sedangkan untuk nilai F-statistik sebesar 7.784442 dengan nilai probabilitas 0.000097 yang berarti lebih kecil dari 0.05. sehingga secara bersama-sama variabel independen berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.

Kemudian untuk mengetahui besar pengaruhnya variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, maka dapat dilihat dari nilai probabilitas pada t-statistik. Apabila nilai probabilitas t-statistik lebih kecil dari 0.05, maka terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini akan diuraikan hubungan dan besar pengaruhnya masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengaruh PPP terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien variabel PPP sebesar -0.370851 dengan nilai probabilitas 0.0000 yang berarti variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap I-HDI di negara OKI. Hasil

penelitian ini mengindikasikan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pada sektor pendidikan memberikan dampak negatif terhadap IHD di negara OKI. Padahal secara konseptual dikatakan bahwa untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan peran pemerintah dalam alokasi anggaran pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan atau ekonomi. Selain itu beberapa penelitian telah membuktikan bahwa hubungan kualitas sumber daya manusia tergantung pada pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan. Meski demikian hasil penelitian menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan negatif terhadap pembangunan manusia di negara OKI. Hal tersebut bisa saja terjadi karena adanya permasalahan anggaran belanja pemerintah yang tidak merata sehingga mengakibatkan besaran anggaran yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan relatif kecil, dan cenderung hanya beberapa persen saja alokasi anggaran pendidikan yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai subsidi di bidang pendidikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmana (2017) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memberikan pengaruh negatif terhadap IPM di negara OKI.

Pengaruh PPK terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien variabel PPK sebesar 0.198809 dengan nilai probabilitas 0.0054 yang berarti variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap IHD di negara OKI. Semakin tinggi tingkat pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, maka akan menaikkan nilai IPM di suatu negara. Hal ini dikarenakan anggaran belanja pemerintah di sektor pendidikan dialokasikan secara merata sehingga lapisan masyarakat merasakan memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dimaknai sebagai fundamental dalam pembangunan sumberdaya manusia (Ananda et al., 2021; Nasution et al., 2021). Selain itu hasil penelitian ini juga sesuai dengan temuan empiris Arifin (2015), Putri & Mintaroem (2020) dan Sholekhah (2018), yang menjelaskan bahwa pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM.

Pengaruh FDI terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien variabel FDI sebesar 0.035728 dengan nilai probabilitas 0.6009 yang berarti variabel FDI tidak berpengaruh positif signifikan terhadap IHDI di negara OKI. Hal ini berarti tinggi rendahnya arus investasi asing yang masuk tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kualitas pembangunan manusia di negara OKI. Banyaknya modal yang diterima suatu negara bisa saja dianggarkan ke sektor publik lainnya yang tidak memberikan dampak terhadap pembangunan manusia sehingga banyak investasi yang masuk tidak memberikan respon perbaikan kualitas indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Firdauzi (2020) yang menjelaskan bahwa variabel FDI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM di negara OKI

Pengaruh CPI terhadap *Islamic Human Development Index* (I-HDI)

Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien variabel CPI sebesar 5.671876 dengan nilai probabilitas 0.0000 yang berarti variabel CPI berpengaruh positif signifikan terhadap IHDI di negara OKI. Dita Ayu Anantika (2020) menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan penting bagi pemerintah yang secara langsung dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat karena ketidakpastian alokasi anggaran publik yang seharusnya digunakan dalam peningkatan pembangunan manusia. Sehingga semakin tinggi nilai skor CPI yang dimiliki suatu negara, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan manusia dengan adanya kepastian alokasi dana yang jelas dalam pembangunan serta tingkat birokrasi yang baik. Selain itu hasil penelitian ini sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Sims et al. (2012) dan Del Monte & Papagni (2001), bahwa dalam peningkatan pembangunan manusia tidak terlepas dengan pemberantasan korupsi. Maka untuk meningkatkan IHDI di suatu negara pemerintah perlu memperkuat birokrasi hukum yang ada dan melakukan pemberantasan korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan oleh

pemerintah pada sektor pendidikan memberikan dampak negatif terhadap I-HDI di negara OKI. Padahal secara konseptual dikatakan bahwa untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan peran pemerintah dalam alokasi anggaran pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan atau ekonomi. Hal tersebut bisa saja terjadi karena adanya permasalahan anggaran belanja pemerintah yang tidak merata sehingga mengakibatkan besaran anggaran yang dikeluarkan untuk sektor pendidikan relatif kecil, dan cenderung hanya beberapa persen saja alokasi anggaran pendidikan yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai subsidi di bidang pendidikan.

2. Hasil menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap I-HDI di negara OKI. Semakin tinggi tingkat pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, maka akan menaikkan nilai IPM di suatu negara. Hal ini dikarenakan anggaran belanja pemerintah di sektor pendidikan dialokasikan secara merata sehingga lapisan masyarakat merasakan memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel FDI tidak berpengaruh positif signifikan terhadap I-HDI di negara OKI. Hal ini terjadi bias saja karena banyaknya modal yang diterima suatu negara hanya dianggarkan ke sektor publik lainnya yang tidak memberikan dampak terhadap pembangunan manusia sehingga banyak investasi yang masuk tidak memberikan respon perbaikan kualitas indeks pembangunan manusia.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CPI berpengaruh positif signifikan terhadap I-HDI di negara OKI. Hal ini disebabkan oleh tinggi nilai skor CPI yang dimiliki suatu negara menandakan adanya kepastian alokasi dana yang jelas dalam pembangunan serta tingkat birokrasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, I. A., Agama, I., Sultan, I., Syafiuddin, M., Sukmawati, U. S., Agama, I., Sultan, I., Syafiuddin, M., Kidrian, E., Agama, I., Sultan, I., & Syafiuddin, M. (2021). *PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010-2019*. 4(2), 429–452.
- Andini, A. (2017). *Analisis Determinan Pembangunan Manusia Di Beberapa Negara Asean Periode 2002-2015*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35486>
- Anindita, F. B., Marbun, J., & Supriyadi, A. (2019). *Pengaruh Produk Domestik bruto, Nilai Ekspor, dan Inflasi Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia Pada Tahun 2010-2019*. 8(1), 1455–1462.
- Arifin, M. Y. (2015). *Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur 2006-2013*.
- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara W., H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehata Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 1(1), 77. <https://doi.org/10.21009/jpeb.001.1.5>
- Atmajaya, M., & Widiaty, E. (2021). Analisis Foreign Direct Investment (FDI) dan ZIS Terhadap Human Development Index (HDI) di Indonesia Tahun 2012-2019 dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi Dan Kajian Keislaman*, 1(2), 49–81.
- Bahtiar, Y., & Hannase, M. (2021). DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA: ANALISIS PENDEKATAN MAQASID SYARIAH AL-GHAZALI (STUDI KASUS: 5 PROVINSI INDONESIA BAGIAN TIMUR TAHUN 2010-2018). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(2).
- Brata, A. G. (2005). *Investasi sektor publik lokal, pembangunan manusia, dan kemiskinan. Yogyakarta: Lembaga Penelitian-Universitas Atma Jaya*.
- Chapra, M. U. (2008). *Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī ‘ ah*.
- Del Monte, A., & Papagni, E. (2001). Public expenditure, corruption, and economic growth: the case of Italy. *European Journal of Political Economy*, 17(1), 1–16.
- Dita Ayu Anantika, H. S. (2020). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, KORUPSI, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI NEGARA APEC. *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 9(2337–3814), 168–178.

- Firdauzi, A. (2020). *Pengaruh Indikator Inklusi Keuangan, GDPPC, TIK, Pengangguran, Dan FDI Terhadap IPM Pada Negara OKI Tahun 2004-2018*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Fithri, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 129. <https://doi.org/10.22219/jep.v15i2.5360>
- Hodijah, S. (2015). Analisis penanaman modal asing di indonesia dan pengaruhnya terhadap nilai tukar rupiah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 10(2).
- Irwan, I. H. H. (2019). Konsep Pembangunan Manusia Berdasarkan Maqashid Syariah. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 2001, 20–39.
- Kahang, M. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 130–140.
- Mangkoeseobroto, G. (1994). *Kebijakan ekonomi publik di Indonesia: substansi dan urgensi: kumpulan tulisan*. Gramedia Pustaka Utama.
- MB Hendrie Anto. (2013). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies*, Vol. 19 No.2, Life 1, 69–95.
- Nasution, D. P., Daulay, M. T., Handani, E., Pembangunan, U., & Budi, P. (2021). *PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR*. 14(1), 33–49.
- Necati Aydin. (2017). Islamic versus conventional human development index : empirical evidence from ten Muslim countries. *International Journal of Social Economics*, 2–40.
- Palenewen, T. O. M., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap IPM dan Dampaknya terhadap Kemiskinan di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).
- Putri, R. M., & Mintaroem, K. (2020). Determinan Islamic Human Development Index (Ihdi) Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1410. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1410-1420>
- Razmi, M. J., Abbasian, E., & Mohammadi, S. (2012). *Investigating the effect of government health expenditure on HDI in Iran*. KMRP.
- Sanggalorang, S., Rumat, V., & Siwu, H. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(3).
- Setiawan, R., Darmawan, E., & Kurnianingsih, F. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 5(1), 65–75.
- Sholekhah, U. (2018). *Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada*

- 6 Negara ASEAN). Universitas Brawijaya.
- Sims, R. L., Gong, B., & Ruppel, C. P. (2012). A contingency theory of corruption: The effect of human development and national culture. *The Social Science Journal*, 49(1), 90–97.
- Sitaniapessy, H. A. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pdrb Dan Pad. *Jurnal Economia (Yogyakarta)*, 9(1), 38–51.
- Sukmana, R. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 16 Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 67–91.
- TANDIPAI, A. (2019). *ANALISIS PENANAMAN MODAL ASING LANGSUNG TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA*. Universitas Gadjah Mada.
- Todaro, M. P. (2008). Economic Development in the Third World (Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga). *Erlangga. Jakarta*.